



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**KEGIATAN :
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BUMD
BIDANG KEUANGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- Nama Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan.
- Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Besar Anggaran : Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta luar provinsi.
- Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati dan mendorong untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui penyusunan kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran Kegiatan penyusunan kebijakan BUMD Bidang Keuangan tahun 2019 adalah PD BPR BKK, PD BKK dan PT Bank Jateng yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

D. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan penyusunan kebijakan BUMD Bidang Keuangan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

1. Amandemen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
2. Amandemen Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
3. Pengintegrasian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Operasional BPR BKK Se – Jawa Tengah.
4. Penguatan Penyertaan Modal untuk Peningkatan Kinerja PT BPR BKK (Perseroda) Tahun 2020.
5. Penyertaan Modal PT BKK Jateng (Perseroda).

E. TUJUAN DAN OUTPUT :

1. Amandemen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
 - a. Tujuan
Tersusunnya amandemen perda terbaru BPR BKK
 - b. Output
Adanya regulasi/payung hukum untuk Likuidasi BPR BKK dan Konsolidasi 29 BPR BKK di Jawa Tengah
2. Amandemen Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

- a. Tujuan
Tersusunnya amandemen Pergub terbaru BPR BKK
- b. Output
Adanya regulasi/payung hukum untuk Pengadaan Pegawai BPR BKK di Jawa Tengah
3. Pengintegrasian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Operasional BPR BKK Se – Jawa Tengah
 - a. Tujuan
Tersusunnya SOP yang terintegrasi sebagai pedoman operasional BPR BKK Se – Jawa Tengah
 - b. Output
Adanya pedoman yang jelas dalam Operasional PT BPR BKK Se – Jawa Tengah
4. Penguatan Penyertaan Modal untuk Peningkatan Kinerja PT BPR BKK (Perseroda) Tahun 2020
 - a. Tujuan
Mendorong dan meningkatkan Kinerja PT BPR BKK Se – Jawa Tengah
 - b. Output
Meningkatkan Deviden kepada Pemegang Saham PT BPR BKK Se – Jawa Tengah
5. Penyertaan Modal PT BKK Jateng (Perseroda)
 - a. Tujuan
Mendorong dan meningkatkan Kinerja PT BKK Jateng (Perseroda)
 - b. Output
Meningkatkan Deviden kepada Pemegang Saham PT BKK Jateng (Perseroda)

F. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Koordinasi BUMD Bidang Keuangan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

G. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Semarang, Mei 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN



EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660611 198602 1 001